

# **RENCANA STRATEGIS 2025-2029**



**DINAS KETAHANAN PANGAN  
KABUPATEN MAMUJU**



BUPATI MAMUJU  
PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI MAMUJU  
NOMOR 276 TAHUN 2025

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS  
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

BUPATI MAMUJU,


- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 108 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menyebutkan salah satu tahapan persiapan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah yakni pembentukan tim penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penyusunan Rencana Strategis sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

- 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  9. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 3);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2024 Nomor 8);
  12. Peraturan Bupati Mamuju Nomor 34 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2024 Nomor 34) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Mamuju Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Mamuju Nomor 34 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2025 Nomor 5);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.**

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan Bupati ini;
- KEDUA : Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yakni Rencana Strategis Perangkat Daerah pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mamuju Tahun 2025-2029;
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas yakni:
- a. mempersiapkan agenda kerja penyusunan Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
  - b. mengoordinasikan pelaksanaan tahapan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
  - c. mempersiapkan data dan informasi perencanaan pembangunan bidang pangan berdasarkan Sistem Informasi Pemerintah Daerah, Data Dasar, dan Data Sektoral lainnya;
  - d. melaksanakan penyusunan rancangan awal, rancangan akhir, dan penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
  - e. melaksanakan koordinasi dan verifikasi Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah dalam rangka Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029; dan
  - f. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati melalui Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah untuk diverifikasi dan dijadikan sebagai bahan masukan dalam penyempurnaan rancangan awal RPJMD.
- KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai yang tercantum dalam DPA Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2025;
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetankan di Mamuju  
pada tanggal, 15 Mei 2025  
BUPATI MAMUJU,  
  
NITI SUTANAH SUHARDI

TEMBUSAN:

1. Ketua DPRD Kabupaten Mamuju di Mamuju.
2. Inspektur Daerah Kabupaten Mamuju di Mamuju.
3. Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah di Mamuju.
4. Kepala BPKAD Kabupaten Mamuju di Mamuju.
5. Depala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mamuju di Mamuju.
6. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Mamuju di Mamuju.
7. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Mamuju di Mamuju.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAMUJU  
NOMOR 276 TAHUN 2025  
TANGGAL, 15 Mei 2025

SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
TAHUN 2025-2029

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA/JABATAN
1.	KETUA	Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mamuju
2.	SEKRETARIS	Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mamuju
3.	ANGGOTA	
	KELOMPOK KERJA I	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mamuju.</li><li>2. Pejabat Fungsional Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mamuju.</li><li>3. Pejabat Fungsional Analis Ketahanan Pangan Ahli Pertama Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mamuju.</li></ol>
	KELOMPOK KERJA II	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mamuju.</li><li>2. Pejabat Fungsional Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mamuju.</li><li>3. Pejabat Fungsional Analis Ketahanan Pangan Ahli Pertama Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mamuju</li></ol>
	KELOMPOK KERJA III	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kepala Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mamuju.</li><li>2. Pejabat Fungsional Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda/Madya Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mamuju</li><li>3. Pelaksana</li></ol>
	KELOMPOK KERJA IV	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kepala Sub Bagian Umum, Perencanaan dan Evaluasi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mamuju</li><li>2. Analis Keuangan Pusat &amp; Daerah</li><li>3. Pelaksana</li></ol>

BUPATI MAMUJU,  
  
SITI SUTINAH SUHARDI

## **KATA PENGANTAR**

Dalam rangka memantapkan dan meningkatkan ketahanan pangan nasional yang berbasis pada kedaulatan pangan dan kemandirian pangan, mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan sesuai misi ke dua Asta Cita dan merupakan program prioritas pertama Pemerintah Pusat.

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mamuju menyusun Rencana Strategis Tahun 2025-2029 yang memuat tujuan, sasaran, kebijakan, strategi, program, dan kegiatan pembangunan ketahanan pangan. Pelaksanaannya dirancang selama lima tahun sekaligus merumuskan indikator keberhasilannya sehingga arah dan keluarannya jelas serta dapat dievaluasi kinerjanya setiap tahun sebagai bahan perbaikan rencana dan pelaksanaan program tahun berikutnya.

Sesuai tugas dan fungsinya Dinas Ketahanan Pangan melaksanakan 5 (Lima) Program yaitu Program Pengelolaan Sumber daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan, Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat, Program Penanganan Kerawanan Pangan, Program Pengawasan Keamanan Pangan dan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2025-2029 ini diharapkan dapat memberikan acuan dan panduan bagi seluruh pemangku kepentingan, baik di Pusat maupun Daerah, dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan ketahanan pangan untuk mewujudkan ketahanan pangan sampai Tingkat

perseorangan yang berlandaskan kedaulatan pangan dan kemandirian pangan secara berkesinambungan.

Mamuju, Desember 2025

Plt. Kepala Dinas



**MUHAMMAD JUFRI BADAU, SKM, M. Kes**

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. 19760123 200501 1 008

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	iii
DAFTAR TABEL .....	iv
BAB I. PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Dasar Hukum .....	3
1.3. Maksud dan Tujuan .....	6
1.4. Sistematika Penulisan .....	7
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISI STRATEGIS DINAS KETAHANAN PANGAN .....	9
2.1. Gambaran Pelayanan .....	9
2.1.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi ..	9
2.1.2. Sumber Daya Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mamuju .....	16
2.1.3. Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan pangan Kabupaten Mamuju .....	19
2.1.4. Realisasi Anggaran .....	25
2.1.5. Kelompok Sasaran Layanan .....	27
2.1.6. Mitra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mamuju Dalam Pemberian Pelayanan .....	27
2.1.7. Dukungan BUMD Dalam Pencapaian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mamuju .....	29
2.1.8. Kerjasama Daerah Yang Menjadi Tanggungjawab Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mamuju .....	30
2.2. Permasalahan dan Isu Strategis .....	30
2.2.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan .....	30
2.2.2. Telaahan K/L & Provinsi Sulawesi Barat ...	33
2.2.3. Telaahan RTRW dan KLHS .....	34
2.2.4. Isu Strategis .....	35
BAB III. TUJUAN, SASARAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....	37
3.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan .....	37
3.2. Strategi Dinas Ketahanan Pangan .....	39
3.3. Arah Kebijakan Dinas Ketahanan Pangan .....	40
3.4. Penahapan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mamuju .....	43

BAB IV.	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....	44
4.1.	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan .....	44
4.2.	Kinerja Penyelenggaraan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mamuju .....	76
BAB V.	PENUTUP .....	79

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan .....	17
Tabel 2.2	Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin .....	17
Tabel 2.3	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan ..	17
Tabel 2.4	Sarana Prasarana Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mamuju .....	18
Tabel 2.5	Pencapaian kinerja pelayanan Tahun 2021-2024 ..	20
Tabel 2.6	Anggaran dan realisasi pendanaan kegiatan Tahun 2021-2024 .....	26
Tabel 2.7	Jenis Pelayanan dan Kelompok Sasaran Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mamuju .....	27
Tabel 2.8	Mitra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mamuju .....	28
Tabel 2.9	Dukungan BUMD Dalam Pencapaian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mamuju .....	29
Tabel 2.10	Kerjasama Yang Menjadi Tanggungjawab Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mamuju .....	30
Tabel 2.11	Pemetaan permasalahan dan penentuan prioritas Sasaran Pembangunan Daerah .....	31
Tabel 2.12	Isu Strategis Dinas Ketahanan Pangan .....	36
Tabel 3.1	Tujuan dan sasaran Dinas Kethanan Pangan Kabupaten Mamuju .....	39
Tabel 3.2	Tujuan, sasaran dan strategi Dinas Ketahanan Pangan .....	40
Tabel 3.3	Arah Kebijakan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mamuju .....	42
Tabel 3.4	Penahapan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mamuju .....	43
Tabel 4.1	Perumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mamuju .....	49
Tabel 4.2	Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan .....	62
Tabel 4.3	Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah .....	75
Tabel 4.4	Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mamuju .....	77
Tabel 4.5	Indikator Kinerja Daerah (IKD) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mamuju .....	77
Tabel 4.6	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mamuju .....	78

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Peran pangan bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan fisik dasar dan mencegah kelaparan. Namun lebih dari itu, pangan dengan kandungan gizi di dalamnya berperan nyata bagi peningkatan kualitas hidup manusia untuk menghasilkan manusia yang sehat, aktif dan produktif. Oleh karena itu, ketahanan pangan menjadi prioritas untuk memenuhi kebutuhan permintaan pangan di Kabupaten Mamuju secara merata dan berkesinambungan dengan memperhatikan potensi sumberdaya lokal dan kearifan lingkungan.

Renstra OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) tahun, yang memuat : Tujuan, sasaran strategi, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi OPD dengan berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.

Mekanisme penyusunan dokumen Renstra ini mengacu kepada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mamuju Tahun 2025 - 2029. Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan di semua bidang terlebih dahulu harus dilakukan proses perencanaan yang sistematis, terpadu, terarah serta tepat sasaran agar apa yang menjadi tujuan dapat dicapai dan sesuai dengan apa yang diharapkan. Sedangkan perencanaan didefinisikan sebagai suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan, dengan

memperhitungkan sumberdaya yang tersedia. Selain itu perencanaan dapat diartikan pula sebagai suatu proses kegiatan pengambilan keputusan oleh pemerintah bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan memperhitungkan sumberdaya, iptek dan memperhatikan perkembangan global.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mamuju Tahun 2025-2029 memperhatikan Rencana pembangunan nasional khususnya yang berkaitan dengan pembangunan daerah yang memengaruhi pembangunan nasional. Penyusunan Renstra OPD ini juga memperhatikan Renstra Badan Pangan Nasional dan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat, RPJMD Provinsi Sulawesi Barat dan RPJMD Kabupaten Mamuju, serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi.

Dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pangan dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

Pembangunan nasional merupakan pencerminan kehendak seluruh rakyat untuk terus-menerus meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraannya secara adil dan merata dalam segala aspek kehidupan yang dilakukan secara terpadu, terarah, dan berkelanjutan dalam rangka mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur, baik material

maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi setiap rakyat Indonesia. Pangan harus senantiasa tersedia secara cukup, aman, bermutu, bergizi, dan beragam dengan harga yang terjangkau oleh daya beli masyarakat, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat. Untuk mencapai semua itu, perlu diselenggarakan suatu sistem Pangan yang memberikan perlindungan, baik bagi pihak yang memproduksi maupun yang mengkonsumsi pangan.

Penyelenggaraan Pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata dan berkelanjutan dengan berdasarkan pada Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan dan Ketahanan Pangan. Hal itu berarti bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumsi pangan masyarakat sampai pada tingkat perseorangan, negara mempunyai kebebasan untuk menentukan kebijakan Pangannya secara mandiri, tidak dapat didikte oleh pihak mana pun dan para Pelaku Usaha Pangan mempunyai kebebasan untuk menetapkan dan melaksanakan usahanya sesuai dengan sumber daya yang dimilikinya. Pemenuhan konsumsi Pangan tersebut harus mengutamakan produksi dalam negeri dengan memanfaatkan sumber daya dan kearifan lokal secara optimal. Untuk mewujudkan hal tersebut, tiga hal pokok yang harus diperhatikan adalah (i) ketersediaan pangan yang berbasis pada pemanfaatan sumber daya lokal secara optimal, (ii) keterjangkauan pangan dari aspek fisik dan ekonomioleh seluruh Masyarakat serta (iii) pemanfaatan pangan atau konsumsi Pangan dan Gizi untuk hidup sehat, aktif dan produktif.

## **1.2. Dasar Hukum**

Dasar hukum penyusunan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mamuju Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  9. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  12. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman

- Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju;
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 3);
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2024 Nomor 8);
  16. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mamuju Tahun 2025-2029;
  17. Peraturan Bupati Mamuju Nomor 30 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan;
  18. Peraturan Bupati Mamuju Nomor 34 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2024 Nomor 34);

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mamuju Tahun 2025-2029 disusun dengan maksud :

- a. Memberikan arah pembangunan ketahanan pangan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan

Pangan Kabupaten Mamuju sebagai penjabaran atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2025-2029;

- b. Menjadi tolok ukur kinerja pembangunan bidang ketahanan pangan sebagai dasar dalam pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama 5 (lima) tahun;
- c. Memberikan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) tahunan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mamuju selama kurun waktu 5 (lima) tahun.

Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mamuju Tahun 2025-2029 disusun dengan tujuan :

- a. Mewujudkan Tujuan dan Sasaran Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mamuju melalui kebijakan dan program ketahanan pangan dilaksanakan secara sinergis, terpadu dan berkesinambungan dengan memanfaatkan sumber daya secara efisien dan efektif;
- b. Mewujudkan sinkronisasi dan sinergitas pembangunan antara Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mamuju dengan visi, misi, tujuan, kebijakan, program RPJMD Tahun 2025–2029 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;
- c. Mewujudkan partisipasi seluruh pemangku kepentingan sesuai dengan proporsi dan kapasitas yang dimiliki dalam pembangunan ketahanan pangan;

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mamuju Tahun 2025-2029 mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, terdiri dari 5 (lima) bab sebagai berikut :

## BAB I PENDAHULUAN

Bab ini Menjelaskan tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, sistematika penulisan, serta maksud dan tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mamuju.

## BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini menjelaskan Gambaran pelayanan perangkat daerah dan memuat berbagai permasalahan dan isi strategis yang akan menentukan kinerja perangkat daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang.

## BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini memuat dan menjelaskan tujuan dan sasaran renstra perangkat daerah serta strategi dan arah kebijakan perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran renstra perangkat daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan.

## BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini memuat uraian program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas Pembangunan daerah serta target pencapaian kinerja perangkat daerah.

## BAB V PENUTUP

Bab ini menguraikan penegasan dalam penerapan Renstra Perangkat daerah sebagai acuan untuk penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahunnya.

**BAB II**  
**GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS**  
**DINAS KETAHANAN PANGAN**

**2.1. Gambaran Pelayanan**

**2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi**

Dasar Hukum Pembentukan organisasi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mamuju berdasarkan Peraturan Bupati Mamuju Nomor 23 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Mamuju Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mamuju berkedudukan sebagai unsur pendukung pelaksanaan tugas Kepala Daerah dibidang Ketahanan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Mamuju melalui Sekretaris Daerah.

**1) Tugas**

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mamuju mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan.

**2) Fungsi**

Dalam melaksanakan tugas, Dinas ketahanan pangan menyelenggarakan fungsi:

- koordinasi dan pelaksanaan kebijakan ketersediaan pangan, pengelolaan neraca pangan wilayah, cadangan pangan daerah, stabilisasi pasokan dan harga pangan, pengendalian kerawanan pangan dan gizi, penganekaragaman konsumsi pangan, keamanan

- dan mutu pangan, serta penyediaan prasarana dan sarana pangan;
- merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pangan sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - pelaksanaan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara/Daerah di bidang pangan;
  - pelaksanaan pengendalian kerawanan pangan dan pengawasan pemenuhan persyaratan gizi pangan;
  - pelaksanaan pengembangan dan pemantapan penganekaragaman dan pola konsumsi pangan, serta pengawasan penerapan standar keamanan dan mutu pangan;
  - pengembangan sistem informasi pangan dan gizi;
  - koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas ketahanan pangan; dan
  - pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif pada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas ketahanan pangan.

### **3) Struktur Organisasi**

#### **a) Kepala Dinas**

##### **1. Tugas**

Kepala Dinas Ketahanan Pangan mempunyai tugas membantu Bupati dalam memimpin, mengoordinasikan, dan melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketahanan pangan yang menjadi kewenangan Daerah serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah. Tugas pembantuan sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut :

- perumusan dan pelaksanaan kebijakan ketersediaan pangan;

- pengelolaan cadangan pangan daerah;
- stabilisasi pasokan dan harga;
- pengendalian kerawanan pangan dan gizi;
- penganeekaragaman konsumsi;
- keamanan dan mutu pangan;
- pengembangan sistem informasi pangan dan gizi;
- pembinaan;
- pengendalian;
- evaluasi; dan
- pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **2. Fungsi :**

Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas Ketahanan Pangan menyelenggarakan fungsi :

- merumuskan, melaksanakan, memonitoring, mengevaluasi, dan melaporkan kegiatan bidang ketersediaan pangan, cadangan pangan daerah, serta stabilisasi pasokan dan harga pangan;
- merumuskan, melaksanakan, memonitoring, mengevaluasi, dan melaporkan kegiatan bidang pengendalian kerawanan pangan, pemenuhan gizi masyarakat, serta pengawasan keamanan dan mutu pangan;
- merumuskan, melaksanakan, memonitoring, mengevaluasi, dan melaporkan kegiatan bidang penganeekaragaman konsumsi pangan serta pengembangan sistem informasi pangan dan gizi; dan
- merumuskan, melaksanakan, memonitoring, mengevaluasi,

dan melaporkan kegiatan kesekretariatan dalam rangka dukungan administrasi, pembinaan, dan koordinasi penyelenggaraan tugas Dinas Ketahanan Pangan.

**b) Sekretaris**

**1. Tugas :**

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh organisasi di lingkungan dinas ketahanan pangan.

**2. Fungsi :**

Untuk melaksanakan tugasnya, sekretaris menyelenggarakan fungsi :

- koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas ketahanan pangan;
- koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pangan/ketahanan pangan;
- pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, pengelolaan barang milik negara, dan dokumentasi; dan
- pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pada bagian sekretariat Dinas Ketahanan Pangan dibantu oleh Sub bagian Tata Usaha, Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

**c) Bidang Bidang ketersediaan dan stabilisasi pangan**

**1. Tugas :**

Bidang ketersediaan dan stabilisasi pangan mempunyai tugas :

- menyelenggarakan koordinasi;
- perumusan;
- pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan pangan;

- pengelolaan neraca pangan wilayah;
- stabilisasi pasokan dan harga pangan;
- sarana dan prasarana logistik pangan;
- pengadaan;
- pengelolaan; dan
- penyaluran cadangan pangan Pemerintah Daerah

## **2. Fungsi :**

Untuk kelancaran tugas Bidang maka Kepala Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan menyelenggarakan fungsi :

- koordinasi dan melaksanakan kebijakan di bidang ketersediaan, distribusi, dan stabilisasi pasokan dan harga pangan;
- penyiapan perumusan kebijakan di bidang ketersediaan dan stabilisasi pangan;
- pengendalian ketersediaan dan distribusi pangan;
- pengelolaan neraca pangan wilayah;
- penguatan sarana logistik pangan;
- pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pemerintah;
- pengendalian stabilisasi pasokan dan harga pangan di tingkat produsen dan konsumen;
- pemberian bimbingan teknis dan supervisi di Bidang ketersediaan dan stabilisasi pangan
- pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang ketersediaan, distribusi, dan stabilisasi pasokan dan harga pangan; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan dibantu oleh Jabatan Fungsional.

**d) Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi**

**1. Tugas :**

Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan di Bidang kerawanan pangan dan gizi, pengendalian kerawanan pangan dan kewaspadaan pangan dan gizi serta pengawasan pemenuhan persyaratan gizi pangann.

**2. Fungsi :**

Untuk kelancaran tugas Bidang maka Kepala Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi menyelenggarakan fungsi :

- koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di Bidang kerawanan pangan dan gizi;
- perumusan kebijakan di Bidang kerawanan pangan dan gizi;;
- pengendalian kerawanan pangan;
- pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran bantuan pangan untuk masyarakat berpendapatan rendah dan terdampak bencana;
- pengawasan pemenuhan persyaratan gizi pangan;
- penyelamatan pangan
- pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di Bidang kerawanan pangan dan gizi;
- pemberian bimbingan teknis dan supervisi di Bidang kerawanan pangan dan gizi; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Bidang Kerawanan

Pangan dan Gizi dibantu oleh Jabatan Fungsional.

**e) Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan**

**1. Tugas :**

Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai tugas :

- melaksanakan koordinasi;
- perumusan;
- pelaksanaan kebijakan di Bidang Penganekaragaman Pangan;
- promosi pola konsumsi pangan; dan
- pengawasan penerapan standar keamanan dan mutu pangan yang beredar.

**2. Fungsi :**

Untuk melaksanakan tugas Bidang maka Kepala Bidang Penganekaragaman Pangan dan Keamanan Pangan menyelenggarakan fungsi :

- koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di Bidang penganekaragaman pangan dan promosi pola konsumsi pangan dan keamanan pangan;
- perumusan kebijakan di Bidang penganekaragaman pangan, dan promosi pola konsumsi pangan;
- pengembangan dan pemantapan penganekaragaman pangan dan promosi pola konsumsi pangan;
- pengawasan penerapan standar keamanan dan mutu pangan;
- pemberian bimbingan teknis dan supervisi di Bidang penganekaragaman konsumsi dan promosi pola konsumsi dan keamanan dan mutu pangan;

- pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di Bidang penganekaragaman pangan dan promosi pola konsumsi, dan keamanan pangan dan mutu pangan; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

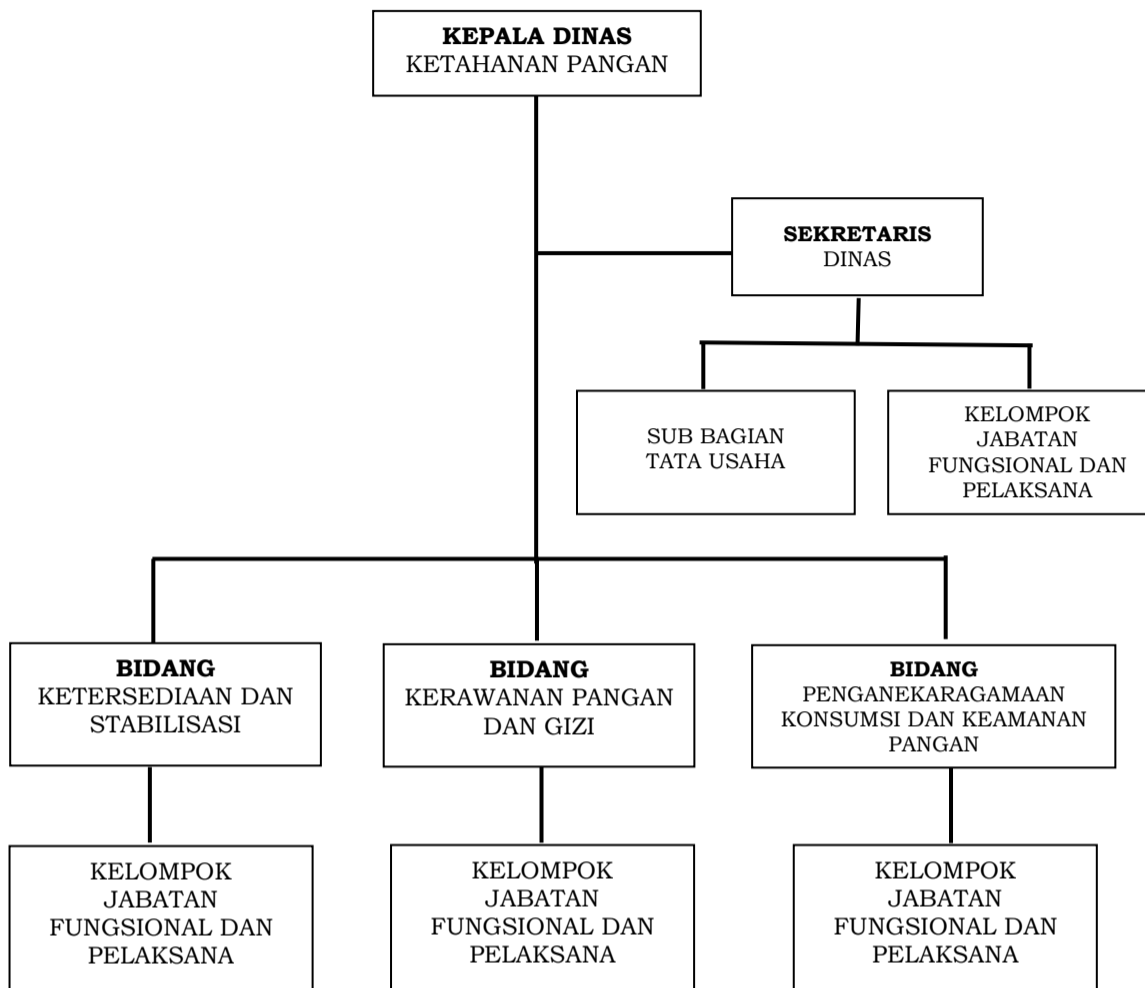
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan dibantu oleh Jabatan Fungsional.

#### **f). Kelompok Jabatan Fungsional**

Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mamuju melakukan kegiatan teknis sesuai dengan keahlian dan keterampilannya masing-masing. Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui pejabat administrator (Eselon III) yang ada di atasnya.

Struktur organisasi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mamuju dapat dilihat pada gambar berikut:

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN MAMUJU**



**2.1.2. Sumber Daya Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mamuju**

**1) Sumber Daya Manusia**

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mamuju memiliki pegawai ASN sebanyak 30 (tiga puluh) orang yang terdiri dari 24 (dua puluh empat) orang PNS dan 6 (enam) Orang PPPK, selain pegawai / personil ASN juga dibantu oleh Tenaga administrasi sebanyak 6 (enam) orang.

Berikut jumlah pegawai Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mamuju berdasarkan jabatan :

Tabel 2.1  
Jumlah Pegawai berdasarkan Jabatan

No	Jabatan	Jumlah	Keterangan
1.	Struktural Eselon II	1	Orang
2.	Struktural Eselon III	4	Orang
3.	Struktural Eselon IV	1	Orang
4.	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	1	Orang
5.	Analisis Ketahanan Pangan Ahli Muda	12	Orang
6.	Analisis Ketahanan Pangan Ahli Pertama	3	Orang
7.	Pelaksana - Pengadministrasi Perkantoran	2	Orang
8.	Terampil (PPPK)	1	Orang
9.	Pemula (PPPK)	5	Orang
	<b>Jumlah</b>	<b>30</b>	<b>Orang</b>

Berdasarkan jenis kelamin, pada Tahun 2025, jumlah pegawai pria yang bekerja sebagai ASN di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mamuju adalah sebanyak 14 (empat belas) orang (46,7 %), dan jumlah pegawai wanita sebanyak 16 (tujuh belas) orang (53,3%).

Tabel 2.2.  
Jumlah Pegawai berdasarkan jenis kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1.	Laki - Laki	14 Orang	46,7 %
2.	Perempuan	16 Orang	53,3 %
	<b>Jumlah</b>	<b>30 Orang</b>	<b>100 %</b>

Berdasarkan Tingkat Pendidikan terakhir yang berhasil diselesaikan oleh pegawai lingkup Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mamuju didominasi oleh Tingkat Pendidikan Sarjana (S1) seperti pada table berikut:

Tabel 2.3  
Jumlah Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1.	Pasca Sarjana (S2)	5 Orang	16,7 %
2.	Sarjana (S1)	18 Orang	60 %
3.	Diploma (D3)	1 Orang	3,3 %
4.	SLTA	6 Orang	20 %
	<b>Jumlah</b>	<b>30 Orang</b>	<b>100 %</b>

## 2) Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mamuju sampai saat ini cukup memadai tetapi belum optimal. Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mamuju dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.4  
Sarana dan Prasarana Dinas Ketahanan Pangan Kab. Mamuju

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Jumlah	Satuan
		Layak	Tidak Layak		
1	Tanah	1		1	Bidang
2	Bangunan Gedung Kantor	1		1	Unit
3	Kendaraan Roda 4	2		2	Unit
4	Kendaraan roda 2	19	4	23	Unit
5	Meja komputer	2		2	Unit
6	Meja biro	9	1	10	Unit
7	Meja kerja kayu	2	2	4	Unit
8	Meja rapat	6	4	10	Unit
9	Sofa	2		2	Set
10	Sound system		1	1	Unit
11	Laptop	9	11	20	Unit
12	Lemari kaca	2		2	Unit
13	Kursi tamu	2	1	3	Unit
14	Kursi kerja	2		2	Unit
15	Lemari es	2		2	Unit
16	PC Unit		3	3	Unit
17	Monitor		1	1	Unit
18	AC	5	3	8	Unit
19	Kamera film	1		1	Unit
20	Lemari besi	1		1	Unit
21	Layar film / proyektor	1	1	2	Unit
22	Meja kerja pejabat eselon II	1		1	Unit
23	Kursi kerja pejabat eselon II	1		1	Unit
24	Freeze	1		1	Unit
25	Timbangan elektronik	2		2	Unit
26	Note book	2		2	Unit
27	Printer	5		5	Unit
28	LCD proyektor	1		1	Unit
29	Mesin jahit karung	1		1	Unit
30	Gerobak dorong	1		1	Unit

### **2.1.3. Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mamuju**

Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mamuju diarahkan dan difokuskan pada pemantapan ketahanan pangan dengan melaksanakan fungsi koordinasi dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan masyarakat Mamuju.

Upaya pencapaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mamuju dalam bentuk pembinaan ketahanan pangan dan didukung melalui program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten / kota.

Penjelasan secara rinci tentang pencapaian kinerja pelayanan periode tahun 2021 -2024 diuraikan pada Tabel 2.5 berikut :

Tabel 2.5  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan pangan Kabupaten Mamuju  
Tahun 2021 - 2024

No	Indikator	Target Kinerja					Realisasi Kinerja					Capaian Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
	<b>IKU</b>															
1	Persentase Cadangan Pangan Utama Pemerintah (Beras)	0,6 % (1 Ton)	5 % (8,850 Ton)	8,6 % (15 Ton)	11,5 % (20 Ton)	17,2 % (30 Ton)	0,3 % (0,5 Ton)	5 % (8,850 Ton)	14,7% (25,797 Ton)	49,9% (86,7 Ton)	63,7 % (111 Ton)	0,3 %	5%	14,7 %	49,9 %	63,7 %
2	Persentase Desa Tahan Pangan	100	100	100	100	100	72,8	84	90	96	100	72,8 %	84%	90%	96%	100%
3	Tingkat Harga gabah Kering Panen(GKP) ditingkat produsen dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%
4	Persentase Coefisien Variasi harga pangan pokok (beras) di tingkat konsumen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%
5	Tingkat Konsumsi Energi	100	100	100	100	100	84	85	97	100	100	84%	85%	97%	100%	100%
6	Tingkat Konsumsi Protein	100	100	100	100	100	83	85	94	98	100	83%	85%	94%	98%	100%
7	Persentase Keamanan Pangan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%
8	Nilai Akip	B (65)	B (66)	B (67)	B (68)	B (69)	B (66)	B (66.82)	B (67.25)	B (68.75)	B (69)	102%	100%	100%	101%	100%

No	Indikator	Target Kinerja					Realisasi Kinerja					Capaian Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
	<b>IKK</b>															
1	Skor Pola Pangan Harapan Ketersediaan	91	92	93	94	95	76,99	91,73	93,54	95,25	95,28	84,6%	99,7%	100,6%	101,4%	100,3
2	Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi	83	84	85	86	87	78,3	76,7	80,2	82,3	88,62	94,44%	91,3%	94,4%	95,7%	101,9
3	Persentase Cadangan Pangan Utama Pemerintah (Beras)	0,6 % (1 Ton)	5 % (8,850 Ton)	8,6 % (15 Ton)	11,5 % (20 Ton)	17,2 % (30 Ton)	0,3 % (0,5 Ton)	5 % (8,850 Ton)	14,7% (25,797 Ton)	49,9% (86,7 Ton)	63,7 % (111 Ton)	50%	100%	127%	434%	370%
4	Persentase Desa Tahan Pangan	100	100	100	100	100	72,8	84	90	96	100	72,8%	84%	90%	96%	100%
5	Koefisien Variasi harga pangan pokok (beras) di tingkat konsumen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%
6	Persentase Rata-rata Tingkat Konsumsi Energi dan Protein	100	100	100	100	100	84	85	97	100	100	84%	85%	97%	100%	100%
7	Tingkat Keamanan Pangan	100	100	100	100	100	83	85	94	100	100	83%	85%	94%	100%	100%
8	Persentase Ketersediaan Pangan Terhadap Kebutuhan Masyarakat	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%
9	Persentase Jumlah Konsumsi Energi Terhadap Standar Nasional	100	100	100	100	100	84	85	97	100	100	85%	97%	100%	100%	100%
10	Persentase Jumlah Konsumsi Protein Terhadap Standar Nasional	100	100	100	100	100	83	85	94	98	100	83%	85%	94%	98%	100%
11	Capaian Analisis Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%
12	Persentase PSAT yang memenuhi Syarat Keamanan dan Mutu Pangan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%

No	Indikator	Target Kinerja					Realisasi Kinerja					Capaian Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
13	Peningkatan Ketersediaan Pangan Strategis Dalam Negeri	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%
14	Meningkatnya Keamanan dan Mutu Pangan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%
15	Terwujudnya Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mamuju menunjukkan capaian kinerja yang beragam sepanjang tahun 2021 hingga 2024 berdasarkan indikator yang telah ditetapkan. Capaian ini mencerminkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah (OPD) dalam meningkatkan kinerja dalam mendukung ketahanan pangan daerah.

1. Skor PPH Ketersediaan

Kinerja pada indikator ini menunjukkan peningkatan setiap tahunnya walaupun pada tahun 2021 realisasi capaian kinerja tidak mencapai target yaitu 91,73 dari target yang ditetapkan sebesar 92 namun ditahun 2022 sampai dengan 2024 terus mengalami peningkatan bahkan melampaui target yang ditetapkan.

2. Skor PPH Konsumsi

Capaian kinerja pada indikator skor PPH konsumsi mengalami peningkatan setiap tahunnya walaupun ditahun 2021 sampai dengan 2023 capaian kinerja tidak mencapai target yang ditetapkan namun ditahun 2024 capaian kinerja yang diperoleh mencapai 88,62 melampaui target yang ditetapkan sebesar 86 poin yang menunjukkan bahwa ditahun 2024 konsumsi masyarakat mamuju sudah beragam.

3. Persentase Cadangan Pangan Utama Pemerintah (Beras)

Ketersediaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (beras) setiap tahunnya mengalami peningkatan, di tahun 2023 ketersediaan beras sebagai Cadangan pangan daerah mengalami peningkatan mencapai 79,5 Ton dan terus mengalami peningkatan di tahun 2024 mencapai 111 ton melampaui target yang ditetapkan.

4. Persentase Desa Tahan pangan

Capaian kinerja pada indikator ini mengalami peningkatan setiap tahunnya walaupun di tahun 2021 sampai 2023 belum mencapai target 100 % namun ditahun 2024 capaian kinerja sudah mencapai 100 %, berdasarkan hasil analisis peta kerawanan pangan dan gizi menunjukkan

bahwa semua desa di Kabupaten Mamuju sudah masuk kategori Tahan Pangan berdasarkan indikator yang ditetapkan.

5. Tingkat Harga gabah Kering Panen(GKP) ditingkat produsen dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP)

Pada indikator ini, capaian kinerja yang diperoleh dari tahun 2021 sampai dengan 2024 sudah mencapai target Dimana harga gabah kering panen ditingkat produsen setiap tahunnya lebih tinggi dibanding Harga yang ditetapkan oleh pemerintah.

6. Persentase Koefisien variasi harga pangan pokok (beras) ditingkat konsumen

Capaian kinerja pada indikator ini mulai dari tahu 2021 sampai dengan 2024 tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan setiap tahunnya Dimana coefisien Variabel komoditas beras masih dibawah standar yang ditetapkan oleh pemerintah.

7. Tingkat Konsumsi Energi (1.200 Kkal)

Capaian kinerja pada indikator tingkat konsumsi energi menunjukkan peningkatan setiap tahunnya walaupun di tahun 2021 dan 2022 belum mencapai target yang ditetapkan namun ditahun 2023 dan 2024 sudah mencapai target yang ditetapkan yaitu 100 % yang artinya tingkat konsumsi energi masyarakat mamuju sudah mencukupi sesuai dengan standar yang ditetapkan yaitu 1.200 Kkal/Kap/Hari.

8. Tingkat Konsumsi Protein (57 Gr)

Capaian kinerja pada indikator tingkat konsumsi protein juga menunjukkan peningkatan setiap tahunnya walaupun ditahun 2021 sampai dengan 2023 belum mencapai target namun di tahun 2024 sudah mencapai target 100 % yang artinya tingkat konsumsi protein masyarakat di Kabupaten Mamuju sudah memenuhi standar yang ditetapkan yaitu 57 Gr/Kap/Hari.

9. Persentase Keamanan Pangan

Pada indikator Persentase keamanan pangan diperoleh capaian kinerja

sebesar 100 % setiap tahunnya mulai dari tahun 2021 sampai dengan 2024 yang artinya mencapai target yang ditetapkan. Berdasarkan uji sampel pangan segar asal tumbuhan di beberapa lokasi yang ada di Kabupaten Mamuju menunjukkan bahan pangan aman untuk dikonsumsi.

#### **2.1.4. Realisasi Anggaran**

Realisasi anggaran belanja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mamuju periode 2021-2024 selama kurun waktu empat tahun berdasarkan program kegiatan yang dilaksanakan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.6  
Realisasi Anggaran Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mamuju  
Tahun 2021 - 2024

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio Realisasi Anggaran pada Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2,041,995,839	2,131,780,000	2,425,597,577	2,091,730,976	2,701,311,524	2,040,925,839	2,121,543,999	2,422,187,577	2,040,599,802	2,668,142,153	99.9	99.5	99.9	97.6	98.8
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	0	0	3,000,000,000	0	0	0	0	3,000,000,000	0	0	0	0	100.0	0	0
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	169,915,000	790,496,500	367,990,000	3,841,209,100	525,686,950	169,914,660	790,496,220	367,431,817	3,760,852,112	518,478,994	100.0	100.0	99.8	97.9	98.6
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	98,625,550	133,756,826	32,000,000	27,107,850	30,946,500	98,625,550	133,756,826	31,920,050	27,107,850	29,338,500	100.0	100.0	99.8	100.0	94.8
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	40,250,000	31,000,000	34,339,240	27,318,920	14,916,400	40,250,000	30,803,560	34,339,240	27,318,920	14,916,400	100.0	99.4	100.0	100.0	100.0
<b>JUMLAH</b>	<b>2,350,786,389</b>	<b>3,087,033,326</b>	<b>5,859,926,817</b>	<b>5,987,366,846</b>	<b>3,272,861,374</b>	<b>2,349,716,049</b>	<b>3,076,600,605</b>	<b>5,855,878,684</b>	<b>5,855,878,684</b>	<b>3,230,876,047</b>	<b>100.0</b>	<b>99.7</b>	<b>99.9</b>	<b>97.8</b>	<b>98.7</b>

### 2.1.5. Kelompok Sasaran Layanan

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mamuju memiliki kewajiban untuk melakukan layanan kepada masyarakat meliputi kelompok lumbung pangan, Kelompok Tani (Poktan), Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), Kelompok Wanita Tani (KWT), Tim Penggerak PKK, pedagang dan pelaku usaha Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT). Berikut adalah kelompok sasaran pelayanan utama Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mamuju seperti pada tabel berikut

Tabel 2.7  
Jenis Pelayanan dan Kelompok Sasaran Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mamuju

No	Bidang	Jenis Layanan	Kelompok Sasaran
1.	Distribusi dan cadangan pangan	Gerakan Pangan Murah	Masyarakat umum
2.	Penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan	Pemberian bantuan bibit sayuran	Kelompok masyarakat
		Uji sampel pangan segar asal tumbuhan (keamanan pangan)	pedagang / Pelaku usaha pangan segar asal tumbuhan
3.	Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan	Sumber data primer ketersediaan pangan dan daerah yang masuk wilayah rentan rawan pangan	Instansi terkait

### 2.1.6. Mitra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mamuju Dalam Pemberian Pelayanan

Selain dengan stakeholder terkait, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mamuju menjaga komunikasi dengan Instansi Pembina baik ditingkat Provinsi maupun Pemerintah Pusat serta memberikan pelayanan bagi organisasi pemerintah, swasta maupun masyarakat umum yang membutuhkan data dan informasi tentang kondisi dan

situasi ketahanan pangan di Kabupaten Mamuju. Berikut tabel mitra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mamuju sesuai dengan jenis layanan dan dukungan kinerja :

Tabel 2.8  
Mitra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mamuju

No	Mitra Perangkat Daerah	Jenis Layanan	Dukungan Kinerja
1	BPS	Sumber data primer dalam penyusunan dokumen NBM, FSVA, SKPG	Tersedianya data primer untuk analisis NBM, FSVA, SKPG, sumber daya pangan dan konsumsi pangan
2	PDAM	Sumber data primer RT tanpa air bersih untuk penyusunan dokumen FSVA, SKPG	Tersedianya data primer untuk analisis FSVA & SKPG
3	Dinkes	Sumber data primer jumlah Tenaga kesehatan untuk penyusunan dokumen FSVA & SKPG	Tersedianya data primer untuk analisis FSVA, SKPG & konsumsi pangan
4	Dinas Ketahanan Pangan Provinsi	Pelaporan dokumen hasil analisis NBM, FSVA & SKPG	Terlaporkannya dokumen NBM, FSVA, SKPG & laporan pasokan dan harga pangan
5	Dinas Perhubungan	Sumber data primer tentang Akses jalan untuk penyusunan dokumen FSVA & SKPG	Tersedianya data primer untuk analisis FSVA & SKPG
6	DTHP	Sumber data primer Luas lahan / Jumlah produksi untuk penyusunan dokumen NBM	Tersedianya data primer untuk analisis NBM & konsumsi pangan
7	Dinas Kelautan & Perikanan	Sumber data primer Jumlah produksi ikan untuk penyusunan dokumen NBM	Tersedianya data primer untuk analisis NBM & konsumsi pangan
8	Dinas Sosial	Sumber data primer Prasejahtera untuk penyusunan dokumen FSVA & SKPG	Tersedianya data primer untuk analisis FSVA & SKPG

No	Mitra Perangkat Daerah	Jenis Layanan	Dukungan Kinerja
9	Dinas Perdagangan	Sumber data primer pangan impor & ekspor untuk penyusunan dokumen distribusi pangan	Tersedianyadata primer untuk penyusunan laporan Distribusi Pangan
10	Perbankan	Subsidi harga bahan pangan pada kegiatan Gerakan Pangan Murah (GPM)	Tersedianya dana untuk pembelian bahan pangan
11	BAZNAS	Subsidi harga bahan pangan pada kegiatan Gerakan Pangan Murah (GPM)	Tersedianya dana untuk pembelian bahan pangan
12	Badan Usaha Pangan	Penyedia Bahan Pangan Untuk Gerakan Pangan Murah (GPM)	Tersedianya bahan pangan untuk pasar murah
13	BPPOM	Kerja sama dalam melakukan Uji sampel pangan untuk keamanan bahan pangan	Menjaga kualitas bahan pangan dari bahan berbahaya

### 2.1.7. Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mamuju

Dalam pencapaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mamuju didukung juga oleh BUMD yakni PDAM sebagai sumber data primer RT tanpa air bersih dalam penyusunan dokumen peta kerawanan pangan dan gizi serta dokumen Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi seperti pada table berikut :

Tabel 2.9  
Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mamuju

No	Nama BUMD	Bentuk Dukungan	Dukungan terhadap kinerja
1.	PDAM	Sumber data primer RT tanpa air bersih untuk penyusunan dokumen FSVA dan SKPG	Tersedianya data primer untuk analisis FSVA & SKPG

### **2.1.8. Kerjasama Daerah yang menjadi Tanggungjawab Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mamuju**

Dalam melaksanakan pelayanan Dinas Ketahanan Pangan bekerjasama dengan Perum Bulog Mamuju dalam penyediaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) yang digunakan untuk penanganan daerah rawan pangan seperti pada table berikut :

Tabel 2.10  
Kerjasama Yang Menjadi Tanggungjawab Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mamuju

No	Mitra Kerja Sama	Jenis Kerja Sama	Dukungan terhadap kinerja
1.	Bulog	Penyediaan Cadangan Beras Pemerintah Daerah (CBPD) Kab. Mamuju	Penanganan daerah rawan pangan

## **2.2. Permasalahan dan Isu Strategis**

### **2.2.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan**

Dinas Ketahanan Pangan memiliki tugas dan fungsi yang tercantum dalam Peraturan Bupati Kabupaten Mamuju Nomor 30 Tahun 2016 tentang kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat daerah Dinas Ketahanan Pangan maka Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mamuju mengampu tanggung jawab dalam melaksanakan tugas Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mamuju membantu Bupati untuk mengemban kewenangan di bidang Ketahanan Pangan. Sebagaimana tugas dan kewenangan tersebut, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mamuju memiliki fungsi untuk menyelenggarakan urusan pangan. Terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mamuju di tengah upaya menjalankan tugas dan fungsinya. Permasalahan ini telah teridentifikasi sesuai dengan tugas dan fungsi

Dinas Ketahanan Pangan. Adapun pemetaan permasalahan pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mamuju dapat dilihat pada tabel berikut :

Tael 2.11  
Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas Sasaran Pembangunan Daerah

No.	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1.	Kurangnya sarana dan prasarana cadangan pangan	Belum optimalnya cadangan pangan	Terbatasnya anggaran pengadaan sarana dan prasarana dalam mendukung cadangan pangan
2.	Konsumsi masyarakat masih monoton (tidak beragam)	Kurangnya pemahaman masyarakat tentang pangan yang B2SA	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pola konsumsi masyarakat secara umum masih tergantung pada satu komoditi yaitu beras sebagai sumber karbohidrat</li> <li>• Kurangnya kesadaran masyarakat untuk optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan sebagai sumber pangan dan gizi keluarga</li> </ul>
3.	Pemerataan Pangan	Keterjangkauan pangan masyarakat tidak merata antar waktu dan antar wilayah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Harga pangan strategis yang fluktuatif</li> <li>• Belum terpetakan jalur distribusi pangan di daerah</li> <li>• Rendahnya akses pangan pada kondisi tertentu</li> </ul>
4.	Mutu dan Keamanan Pangan	Produk Pangan Segar Asal Tumbuhan (PAST) masih rawan cemaran pestisida /bahan kimia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terbatasnya SDM sebagai petugas bersertifikasi keamanan pangan segar asal tumbuhan (PSAT)</li> <li>• Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung uji mutu dan keamanan pangan</li> </ul>

Dari identifikasi permasalahan di atas dapat disimpulkan permasalahan yang dihadapi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mamuju dalam melaksanakan pelayanan dibidang ketahanan pangan antara lain :

1. Penguatan cadangan pangan masyarakat masih belum optimal disebabkan belum optimalnya kegiatan penyiangan cadangan pangan di kelompok Lumbung Pangan Masyarakat (LPM);
2. Penganekaragaman pangan belum optimal terutama penganekaragaman konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) berbasis pangan lokal;
3. Keterjangkauan pangan masyarakat tidak merata disebabkan harga pangan strategis yang fluktuatif dan rendahnya akses pangan;
4. Kualitas keamanan konsumsi pangan masih rendah akibat terbatasnya SDM sebagai petugas keamanan pangan serta terbatasnya sarana dan prasarana pendukung uji mutu dan keamanan pangan.

Dinas Ketahanan Pangan dalam menjalankan tugas dan fungsi terdapat beberapa faktor penghambat maupun pendorong. Adapun faktor-faktor penghambat teridentifikasi sebagai berikut :

1. Minimnya ketersediaan SDM yang kompeten pada urusan pangan
2. Ketergantungan masyarakat akan komoditas beras sebagai bahan pangan pokok masih tinggi
3. Keterbatasan pengetahuan masyarakat tentang penganekaragaman pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)
4. Masih Kurangnya sarana dan prasarana dalam mendukung Cadangan pangan
5. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya mutu dan keamanan pangan yang dikonsumsi.

Sedangkan faktor pendorong dinas dalam menjalankan tugas dan

fungsinya sebagai berikut :

1. Dukungan dari pemerintah melalui APBN maupun APBD Kabupaten Mamuju
2. Komitmen pimpinan dalam mewujudkan tujuan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mamuju.

### **2.2.2. Telaahan K/L dan Provinsis Sulawesi Barat**

Telaahan Renstra Kementarian/Lembaga (K/L) dan Renstra Provinsi Sulawesi Barat dilakukan untuk memastikan bahwa perencanaan satrategis Dinas Ketahanan pangan Kabupaten Mamuju Tahun 2025-2029 selaras dengan kebijakan nasional dan daerah. Hal ini juga guna menjamin integrasi dan sinergi pelaksanaan pembangunan daerah dengan prioritas pembangunan nasional dan provinsi, khususnya terkait dengan peningkatan Ketahanan pangan daerah.

a. Arah kebijakan Badan Pangan Nasional (Bapanas) :

- Penurunan stunting
- Penguatan logistik komoditas pangan
- Pengendalian inflasi pangan bergejolak
- Kemandirian pangan (ketersediaan, konsumsi dan tata kelola pangan)

b. Arah kebijakan Dinas Keahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat :

- Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya dalam rangka stabilitasi pasokan dan harga pangan
- Pengelolaan dan keseimbangan cadangan pangan Provinsi
- Penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya local
- Penanganan kerawanan pangan kewenangan provins

Berdasarkan telaahan Renstra K/L dan Provinsi diatas, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mamuju perlu melakukan pemantapan ketahanan pangan yang meliputi aspek ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan dan pemanfaatan pangan.

### **2.2.3. Telaahan RTRW dan KLHS**

RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) merupakan hasil perencanaan tata ruang yang dilakukan untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dalam suatu kesatuan geografis, berdasarkan aspek administratif atau aspek fungsional. Aspek penting dalam penyusunan tata ruang adalah melihat secara detail kondisi lingkungan dan ekosistem sebuah wilayah, termasuk kondisi ekonomi dan sosial masyarakat di wilayah tersebut. Keberadaan RTRW dan juga sangat bermanfaat karena menjadi pedoman dalam menyusun rencana pembangunan baik jangka panjang, menengah, demikian juga rencana kerja pemerintah jangka pendek sedangkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

Pembangunan ketahanan pangan tidak terlepas dari ketersediaan lahan. Dalam RTRW telah disebutkan kawasan yang dapat mendukung ketahanan pangan yaitu :

1. Kawasan pertanian adalah kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan pertanian yang meliputi kawasan pertanian lahan basah, kawasan lahan pertanian kering, kawasan pertanian tanaman

tahunan/perkebunan, perikanan dan peternakan.

2. Kawasan perikanan adalah kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan perikanan yang meliputi, kawasan peruntukan perikanan budidaya, kawasan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dan sarana dan prasarana perikanan

Penataan ruang Kabupaten Mamuju bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah Kabupaten Mamuju yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan, berbasis pada perkebunan, pertanian, perikanan, kelautan yang berdaya saing tinggi didukung oleh sistem transportasi yang terpadu menuju masyarakat Mamuju yang Sejahtera.

#### **2.2.4. Isu Strategis**

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau diprioritaskan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas di masa mendatang. Suatu kondisi / kejadian yang menjadi isu startegis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan masalah / kerugian yang besar atau sebaliknya. Setelah mempertimbangkan gambaran permasalahan dan faktor penghambat pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mamuju dan berdasarkan hasil reuiu terhadap visi dan misi kepala daerah maka isu strategis dalam ruang lingkup Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mamuju adalah sebagai berikut :

1. Masih Kurangnya sarana dan prasarana dalam mendukung Cadangan pangan.
2. Masih Rendahnya keterjangkauan masyarakat terhadap pangan sebagai akibat belum optimalnya distribusi dan akses pangan

3. Pola konsumsi pangan belum berbasis B2SA
4. Harga bahan pangan masih fluktuatif pada kondisi tertentu
5. Penanganan keamanan pangan belum maksimal

Tabel 2.12  
Isu Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mamuju

Potensi Daerah yang menjadi kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kab. Mamuju (Beras)	Belum optimalnya cadangan pangan	Keterbatasan akses dan kualitas infrastruktur dasar serta sumber daya manusia untuk mendukung peningkatan kesejahteraan Masyarakat	SDGs	Kemandirian Pangan	Ketersediaan Pangan	Masih Kurangnya sarana dan prasarana dalam mendukung Cadangan pangan ( <b>Ketersediaan Pangan</b> )
	Kurangnya pemahaman masyarakat tentang pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)				Rendahnya Penganeka ragaman/d iversifikasi pangan	Pola konsumsi pangan belum berbasis B2SA ( <b>Pemanfaatan Pangan</b> )
	Keterjangkauan pangan masyarakat tidak merata antar waktu dan antar wilayah				Distribusi Pangan, disparitas/ Perbedaan harga dan Bahan pangan pokok masih dominan dari luar daerah Sulawesi Barat	Masih Rendahnya keterjangkauan masyarakat terhadap pangan sebagai akibat belum optimalnya distribusi dan akses pangan ( <b>Keterjangkauan Pangan</b> )
	Produk Pangan Segar Asal Tumbuhan (PAST) masih rawan cemaran pestisida /bahan kimia				Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat/ pelaku usaha tentang keamanan pangan segar	Harga bahan pangan masih fluktuatif pada kondisi tertentu
						Penanganan keamanan pangan belum maksimal

**BAB III**  
**TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

**3.1. Tujuan Dan Sasaran Dinas Ketahanan Pangan**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mamuju Tahun 2025-2029 merupakan suatu perencanaan strategis yang erat kaitannya dengan proses yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun mendatang, bagaimana mencapainya dan langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai sesuai visi, misi dan program kepala daerah terpilih. Dengan perencanaan strategis diharapkan dapat dirumuskan tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Mamuju yang spesifik, realistis dan konsisten dengan Visi:

**“MAMUJU KEREN”**  
**(Kreatif Edukatif Ramah Energik Nyaman)**

Visi diatas menggambarkan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang dan diharapkan Kabupaten Mamuju dapat lebih berperan dalam perubahan yang terjadi di lingkup regional, nasional maupun global. Perumusan dan penjelasan terhadap visi yang dimaksud menghasilkan pilar pilar visi yang diterjemahkan pengertiannya, sebagaimana tabel di bawah ini :

Penjabaran Visi RPJMD Kabupaten Mamuju 2025-2029

<b>VISI</b>	<b>PILAR-PILAR VISI</b>	<b>PENJELASAN PILAR-PILAR VISI</b>
MAMUJU KEREN (Kreatif Edukatif Ramah Energik Nyaman)	Kreatif	Pemerintahan yang senantiasa melahirkan inovasi, adaptif terhadap kemajuan baik dari pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, Jasa dan pariwisata.
	Edukatif	Penyelenggaraan Pendidikan yang layak ntuk semua.
	Ramah	Kondisi sosial Masyarakat yang mengedepankan pendekatan agama, budaya serta kearifam lokal
	Energik	Kondisi masyarakat Mamuju yang sehat, kuat dan penuh semangat.
	Nyaman	Ketersediaan Insfrastruktur yang memadai dikota dan desa

Tabel diatas merupakan penjabaran Visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju yang kemudian disusun Misi sebagai rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Visi Mamuju “KEREN” (Kreatif, Edukatif, Ramah, Energik, Nyaman) akan diwujudkan melalui 5 (Lima) misi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Mamuju Tahun 2025–2029 sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.
- 2. Mewujudkan Daya Saing Ekonomi Daerah Berbasis Potensi Lokal**
3. Mewujudkan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Sosial
4. Mewujudkan Daerah yang Beradab dengan Mengedepankan Pendekatan Kearifan Lokal, Budaya serta Agama
5. Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Fisik dan Ekonomi

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mamuju mendukung Misi Kedua Yaitu **Mewujudkan Daya Saing Ekonomi Daerah Berbasis Potensi Lokal** dan dalam mewujudkan rencana pembangunan daerah maka Dinas Ketahanan Pangan mempunyai tujuan yang merupakan sasaran RPJMD Kabupaten Mamuju yakni “**Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah**” dengan sasaran strategis : meningkatnya ketersediaan pangan, meningkatnya keterjangkauan pangan dan meningkatnya pemanfaatan pangan.

Dengan terwujudnya ketahanan pangan daerah diharapkan tidak ada lagi masyarakat yang masih kelaparan artinya ketersediaan pangan, keterjangkauan Masyarakat terhadap pangan serta keamanan

pangan masyarakat dapat terjamin.

Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Mamuju tahun 2025-2029 yang telah diturunkan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mamuju dalam waktu 5 (Lima) tahun kedepan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1  
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mamuju

NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
<b>NSPK</b> : UU Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Pangan <b>Sasaran RPJMD</b> : Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah	Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah		Indeks Ketahanan Pangan (Indeks)	82,97	84,47	85,97	87,47	88,97	90,47	
		Meningkatnya ketersediaan pangan	Skor PPH Ketersediaan (Nilai)	95.30	95.35	95.40	95.45	95.50	95,55	
		Meningkatnya Keterjangkauan Pangan	Persentase stabilitas harga pangan pokok strategis (Persen)	100	100	100	100	100	100	
		Meningkatnya Pemanfaatan Pangan	Skor PPH Konsumsi (Nilai)	87	88	88.5	89	89.5	90	
		Terselenggaranya Birokrasi Dinas Ketahanan Pangan Yang Efektif, Efisien dan Berorientasi Pada Layanan Prima	Nilai SAKIP OPD	B (69)	B (69.3)	B (69.6)	B (69.9)	BB (70.5)	BB (71)	

### 3.2. Strategi Dinas Ketahanan Pangan

Strategi adalah langkah-langkah yang diambil oleh organisasi dalam hal ini Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mamuju sebagai upaya mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi. Strategi tersebut berisi rencana menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan secara operasional dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya organisasi.

Pemantapan ketahanan pangan tersebut dilakukan dengan 4 (empat) strategi utama seperti pada table berikut :

Tabel 3.2  
Strategi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mamuju

No	Masalah	Tujuan/Sasaran	Rumusan Strategi
1	Belum optimalnya cadangan pangan	Meningkatnya ketersediaan pangan	Peningkatan pengadaan sarana & prasarana dalam mendukung penyediaan cadangan pangan
2	Kurangnya pemahaman masyarakat tentang pangan yang B2SA	Meningkatnya Pemanfaatan Pangan	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dalam memanfaatkan pangan yang Beragam, Bergizi, seimbang dan Aman (B2SA) berbasis sumber daya lokal dan pemanfaatan lahan pekarangan
3	Keterjangkauan pangan masyarakat tidak merata antar waktu dan antar wilayah	Meningkatnya Keterjangkauan Pangan	Peningkatan stabilisasi pasokan dan harga pangan melalui penguatan kelembagaan distribusi pangan, Stabilisasi pasokan, harga dan akses masyarakat terhadap pangan
4	Produk Pangan Segar Asal Tumbuhan (PAST) masih rawan cemaran pestisida /bahan kimia	Meningkatnya Pemanfaatan Pangan	Peningkatan SDM bagi Petugas Pengambil Contoh / sampel) & peningkatan pengadaan sarana dan prasarana pendukung uji mutu dan keamanan pangan

### 3.3. Arah Kebijakan Dinas Ketahanan Pangan

Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang pangan mengamanatkan bahwa penyelenggaraan pangan dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata dan berkelanjutan berdasarkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan dan ketahanan pangan.

Searah dengan kebijakan pangan serta memperhatikan kondisi ketahanan pangan masyarakat selama periode 5 (lima) tahun terakhir tersebut, maka arah kebijakan Dinas Ketahanan Pangan adalah untuk pemantapan ketahanan pangan, yang meliputi aspek ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan dan pemanfaatan pangan.

Kebijakan ketahanan pangan dalam aspek ketersediaan pangan, difokuskan pada:

1. Peningkatan ketersediaan pangan yang beranekaragam berbasis potensi sumber daya lokal; dan
2. Memantapkan penanganan kerawanan pangan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dan kelaparan.

Dalam aspek keterjangkauan pangan, difokuskan pada:

1. Stabilisasi pasokan dan harga pangan; serta
2. Pengelolaan cadangan pangan.

Sedangkan pada aspek pemanfaatan pangan, difokuskan pada:

1. Percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya dan kearifan lokal;
2. Dan ditunjang dengan pengawasan mutu dan keamanan pangan.

Tabel 3.3  
Arah Kebijakan Dinas Ketahanan Pangan Kab. Mamuju

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	AKAR MASALAH	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
1.	<b>NSPK</b> : UU Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan <b>Sasaran RPJMD</b> : Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah	Penguatan daya saing ekonomi dari potensi unggulan daerah	Terbatasnya anggaran pengadaan sarana dan prasarana dalam mendukung cadangan pangan	Pengelolaan cadangan pangan	Aspek ketersediaan pangan
			Pola konsumsi masyarakat secara umum masih tergantung pada satu komoditi yaitu beras sebagai sumber karbohidrat	Percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya dan kearifan lokal	Aspek pemanfaatan pangan
			Kurangnya kesadaran masyarakat untuk optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan sebagai sumber pangan dan gizi keluarga	Memantapkan penanganan kerawanan pangan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dan kelaparan	
			Harga pangan strategis yang fluktuatif	Stabilisasi pasokan dan harga pangan	Aspek keterjangkauan pangan
			Belum terpetakan jalur distribusi pangan di daerah		
			Rendahnya akses pangan pada kondisi tertentu		
			Terbatasnya SDM sebagai petugas bersertifikasi keamanan pangan segar asal tumbuhan (PSAT)	Pengawasan mutu dan keamanan pangan	Aspek pemanfaatan pangan
Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung uji mutu dan keamanan pangan					

### 3.4. Penahapan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mamuju

Penahapan Renstra merupakan prioritas tahunan yang disusun secara bertahap dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mamuju. Penahapan ini menggambarkan alur logis dan progresif dari pelaksanaan program dan kegiatan selama periode lima tahunan. Adapun penahapan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mamuju dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.4  
Penahapan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kab.Mamuju

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
Penguatan ketersediaan pangan pokok strategis melalui Proyeksi Penyusunan Neraca Pangan Wilayah kabupaten/kota dan Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) untuk memberikan informasi ketersediaan pangan pokok strategis dikabupaten mamuju dan mendukung ketersediaan bahan pangan untuk kegiatan MBG dengan Lokus Kabupaten Mamuju	Percepatan penganeakara gaman komoditas pangan melalui bantuan bibit sayuran bagi kelompok masyarakat lokus stunting Kabupaten Mamuju untuk penurunan stunting mengurangi kemiskinan ekstrim	Peningkatan Kemitraan dengan stakeholder terkait melalui koordinasi dan Sinkronisasi Data terkait ketersediaan stok dan pasokan pangan dan Gerakan Pangan Murah (GPM)	Peningkatan Stabilisasi pasokan dan harga pangan melalui Gerakan pangan Murah (GPM) dengan lokus seluruh kecamatan di Kabupaten Mamuju dan di kantor Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mamuju setiap hari kerja untuk pengendalian inflasi daerah Kab.Mamuju	Penguatan cadangan pangan melalui pengadaan cadangan pangan daerah bermitra dengan Perum Bulog Mamuju & Peningkatan keamanan pangan segar asal tumbuhan melalui uji sampel pangan segar asal tumbuhan pada pasar tradisional, pasar modern dan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) / Dapur MBG yang ada di Kecamatan Mamuju, Simboro, Kalukku dan Tapalang

**BAB IV**  
**PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA**  
**PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

**4.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**

Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Program dan Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mamuju yang direncanakan untuk Periode Tahun 2025 – 2029 meliputi Program dan kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2025- 2029 Kabupaten Mamuju dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran.

Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mamuju Tahun 2025-2029 diarahkan untuk mendukung pelaksanaan Tugas dan fungsi sebagaimana susunan organisasi Dinas. Untuk Program dan Kegiatan Tahun 2025- 2029 mengacu pada tema pembangunan RKPD tahun 2026 yaitu Memperkuat Pembangunan Infrastruktur Yang Menunjang Pertumbuhan Ekonomi, Meningkatkan Ketahanan Pangan, Pendidikan dan Kesehatan Demi Kesejahteraan Masyarakat Yang Berkelanjutan dengan melaksanakan prioritas pembangunan kedua yaitu Penguatan

Pertumbuhan Ekonomi dan Ketahanan Pangan Serta Investasi Berbasis Potensi Daerah. Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mamuju mendukung 3 (tiga) aspek ketahanan pangan yaitu ketersediaan pangan, akses pangan dan pemanfaatan pangan. Adapun Rencana Program, Kegiatan dan Sub kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mamuju Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota yang meliputi :
  - c. Kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah dengan sub kegiatan :
    - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
    - Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA – SKPD
    - Koordinasi dan penyusunan Dokumen Perubahan RKA – SKPD
    - Koordinasi dan penyusunan DPA –SKPD
    - Koordinasi dan penyusunan Perubahan DPA –SKPD
    - Evaluasi kinerja perangkat daerah
    - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah
    - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
  - d. Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah dengan sub kegiatan :
    - Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN
    - Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan SKPD
    - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / semesteran SKPD

- e. Kegiatan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah dengan sub kegiatan :
  - Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD
- f. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan sub kegiatan :
  - Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian
- g. Kegiatan administrasi umum perangkat daerah dengan sub kegiatan :
  - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
  - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - Fasilitasi Kunjungan Tamu
  - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- h. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan sub kegiatan :
  - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- i. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan sub kegiatan :
  - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- j. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan sub kegiatan :
  - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak,

- dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan yang meliputi :
- a. Kegiatan penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan sesuai kewenangan daerah kabupaten/kota dengan sub kegiatan :
- Penyediaan infrastuktur pendukung kemandirian pangan lainnya
3. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat yang meliputi :
- a. Kegiatan penyediaan dan penyaluran panga pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah kabupaten / kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan dengan sub kegiatan :
- Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya
  - Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota
  - Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)
  - Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Wilayah kabupaten/kota
- b. Kegiatan pengelolaan dan keseimbangan cadangan pangan kabupaten / kota dengan sub kegiatan :
- Penyusunan rencana kebutuhan pangan lokal

- Pengadaan cadangan pangan pemerintah kabupaten / kota
  - Penguatan Lumbung Pangan Masyarakat (LPM)
- c. Kegiatan pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita / tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi dengan sub kegiatan :
- Penyusunan dan penetapan target konsumsi pangan per kapita per tahun
  - Pemberdayaan masyarakat dalam penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal
4. Program Penanganan Kerawanan Pangan yang meliputi :
- a. Kegiatan penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan dengan sub kegiatan :
- Penyusunan pemutakhiran dan analisis peta ketahanan dan kerentanan pangan
- b. Kegiatan penanganan kerawanan pangan kewenangan kabupaten / kota dengan sub kegiatan :
- Koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan kabupaten / kota
5. Program Pengawasan Keamanan Pangan yang meliputi :
- a. Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota
- Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan

Tabel 4.1  
Perumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten mamuju

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN <i>(01)</i>	TUJUAN <i>(02)</i>	SASARAN <i>(03)</i>	OUTCOME <i>(04)</i>	OUTPUT <i>(05)</i>	INDIKATOR <i>(06)</i>	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN <i>(07)</i>	KETERANGAN <i>(08)</i>			
<b>2.09.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN</b>										
- Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah	Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah	Meningkatnya Ketersediaan Pangan			Indeks Ketahanan Pangan (IKP) (Indeks)					
					Skor Pola Pangan Harapan Ketersediaan (Nilai)					
					Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Tersedianya Infrastruktur dan pendukung kemandirian pangan	Nilai Tukar Petani (NTP) (Indeks)	2.09.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN		
							Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia (Unit)	2.09.02.2.01 - Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		
					Meningkatnya Diversifikasi & Ketahanan Pangan Masyarakat			Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia (Unit)	2.09.02.2.01.0003 - Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	
								Persentase Ketersediaan Energi (%)	2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	
								Persentase Konsumsi Energi (%)	2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	

Terlaksananya Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah Kabupaten/Kota dalam rangka stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Data Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.09.03.2.01 - Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	
	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM) (Dokumen)	2.09.03.2.01 - Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	
	Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota (laporan)	2.09.03.2.01 - Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	
	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya (Laporan)	2.09.03.2.01 - Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	
	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya (Laporan)	2.09.03.2.01.0003 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	
	Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota (laporan)	2.09.03.2.01.0008 - Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	
	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM) (Dokumen)	2.09.03.2.01.0016 - Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	

				Data Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.09.03.2.01.0020 - Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	
			Terkelolanya Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Ton)	2.09.03.2.02 - Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	
				Jumlah LPM yang terfasilitasi (kelompok)	2.09.03.2.02 - Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	
				Rencana Kebutuhan Pangan Lokal (Dokumen)	2.09.03.2.02 - Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	
				Rencana Kebutuhan Pangan Lokal (Dokumen)	2.09.03.2.02.0002 - Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	
				Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Ton)	2.09.03.2.02.0003 - Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	
				Jumlah LPM yang terfasilitasi (kelompok)	2.09.03.2.02.0008 - Penguatan Lumbung Pangan Masyarakat (LPM)	
			Tercapainya Konsumsi Energi Perkapita / Tahun Sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (Laporan)	2.09.03.2.04 - Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	
				Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun (Dokumen)	2.09.03.2.04 - Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	
				Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun (Dokumen)	2.09.03.2.04.0001 - Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	
				Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (Laporan)	2.09.03.2.04.0002 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	
		Meningkatnya Penanganan Kerawanan Pangan		Persentase Capaian Analisis Rentan dan Rawan Pangan (%)	2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	

			Tersedianya Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan (Dokumen)	2.09.04.2.01 - Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	
				Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan (Dokumen)	2.09.04.2.01.0001 - Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	
			Terlaksananya Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota (Laporan)	2.09.04.2.02 - Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota (Laporan)	2.09.04.2.02.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	
	Meningkatnya Pemanfaatan Pangan			Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi (Nilai)		
		Meningkatnya Diversifikasi & Ketahanan Pangan Masyarakat		Persentase Ketersediaan Energi (%)	2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	
				Persentase Konsumsi Energi (%)	2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	
			Terlaksananya Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah Kabupaten/Kota dalam rangka stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Data Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.09.03.2.01 - Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	
				Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM) (Dokumen)	2.09.03.2.01 - Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	

	Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota (laporan)	2.09.03.2.01 - Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	
	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya (Laporan)	2.09.03.2.01 - Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	
	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya (Laporan)	2.09.03.2.01.0003 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	
	Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota (laporan)	2.09.03.2.01.0008 - Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	
	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM) (Dokumen)	2.09.03.2.01.0016 - Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	
	Data Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.09.03.2.01.0020 - Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	
Terkelolanya Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Ton)	2.09.03.2.02 - Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	
	Jumlah LPM yang terfasilitasi (kelompok)	2.09.03.2.02 - Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	
	Rencana Kebutuhan Pangan Lokal (Dokumen)	2.09.03.2.02 - Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	
	Rencana Kebutuhan Pangan Lokal (Dokumen)	2.09.03.2.02.0002 - Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	
	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Ton)	2.09.03.2.02.0003 - Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	

			Jumlah LPM yang terfasilitasi (kelompok)	2.09.03.2.02.0008 - Penguatan Lumbung Pangan Masyarakat (LPM)	
		Tercapainya Konsumsi Energi Perkapita / Tahun Sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (Laporan)	2.09.03.2.04 - Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	
			Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun (Dokumen)	2.09.03.2.04 - Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	
			Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun (Dokumen)	2.09.03.2.04.0001 - Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	
			Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (Laporan)	2.09.03.2.04.0002 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	
	Meningkatnya Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan		Persentase PSAT yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan (%)	2.09.05 - PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	
		Terlaksananya Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah pelaksanaan koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan (Laporan)	2.09.05.2.01 - Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	
			Jumlah pelaksanaan koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan (Laporan)	2.09.05.2.01.0008 - Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	
	Terselenggaranya Birokrasi Dinas Ketahanan Pangan Yang Efektif, Efisien dan Berorientasi Pada Layanan Prima		Nilai SAKIP OPD (Nilai)		
	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, laporan keuangan dan penatausahaan kantor		Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu (%)	2.09.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	

	Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu (%)	2.09.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
	Persentase tertib ketatausahaan kantor (%)	2.09.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
Tersedianya dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang berkualitas	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	2.09.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	2.09.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2.09.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2.09.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	2.09.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	2.09.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2.09.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2.09.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2.09.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2.09.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	2.09.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2.09.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	2.09.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2.09.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	2.09.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	
	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	2.09.01.2.01.0010 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
Tersedianya dokumen Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang berkualitas	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	2.09.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	

				Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	2.09.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	2.09.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	2.09.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	2.09.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
				Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	2.09.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
			Tersedianya dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2.09.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
				Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2.09.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
			Tersedianya dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	2.09.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
				Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	2.09.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
			Terwujudnya Pelayanan Administrasi umum Perangkat Daerah yang berkualitas	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	2.09.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	



Tersedianya dokumen Pelayanan Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat daerah yang berkualitas	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.09.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.09.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.09.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.09.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.09.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.09.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.09.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2.09.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2.09.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2.09.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2.09.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	

				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2.09.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2.09.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.09.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	

Dalam mewujudkan program dan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mamuju, Pemerintah mengalokasikan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk mendanai sejumlah Program dan Kegiatan. Rencana pendanaan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.2  
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Dan Pendanaan

**MISI RPJMD** : **MEWUJUDKAN DAYA SAING EKONOMI DAERAH BERBASIS POTENSI LOKAL**  
**TUJUAN RPJMD** : **TERWUJUDNYA PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH YANG BERDAYA SAING**  
**SASARAN RPJMD** : **MENINGKATNYA KETAHANAN PANGAN DAERAH**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				3.366.939.659,0 0		3.608.900.807,0 0		3.608.900.807,0 0		3.608.900.807,0 0		5.900.562.765,0 0	
2.09.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				3.000.595.859,0 0		3.095.925.807,0 0		3.095.925.807,0 0		3.095.925.807,0 0		3.413.562.765,0 0	
Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, laporan keuangan dan penatausahaan kantor	Persentase tertib ketatausahaan kantor (%)	100	100	3.000.595.859,0 0	100	3.095.925.807,0 0	100	3.095.925.807,0 0	100	3.095.925.807,0 0	100	3.413.562.765,0 0	2.09.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS KETAHANAN PANGAN
	Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu (%)	100	100		100		100		100				
	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu (%)	100	100		100		100		100				
2.09.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				22.098.110,00		26.100.000,00		26.100.000,00		26.100.000,00		48.000.000,00	
Tersedianya dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang berkualitas	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	22.098.110,00	1	26.100.000,00	1	26.100.000,00	1	26.100.000,00	1	48.000.000,00	
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	4		4		4		4				

	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	0	2		2		2		2		2	
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1	
	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	0	1		1		1		1		1	
	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	0	13		13		13		13		13	
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1	
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1	
2.09.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1.392.910,00		3.277.000,00		3.277.000,00		3.277.000,00		6.277.000,00
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	0	2	1.392.910,00	2	3.277.000,00	2	3.277.000,00	2	3.277.000,00	2	6.277.000,00
2.09.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				5.113.400,00		5.400.000,00		5.400.000,00		5.400.000,00		8.000.000,00
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	5.113.400,00	1	5.400.000,00	1	5.400.000,00	1	5.400.000,00	1	8.000.000,00

2.09.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				3.716.000,00		3.200.000,00		3.200.000,00		3.200.000,00		8.000.000,00	
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	3.716.000,00	1	3.200.000,00	1	3.200.000,00	1	3.200.000,00	1	8.000.000,00	
2.09.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				3.974.600,00		3.500.000,00		3.500.000,00		3.500.000,00		6.000.000,00	
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	3.974.600,00	1	3.500.000,00	1	3.500.000,00	1	3.500.000,00	1	6.000.000,00	
2.09.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				3.149.200,00		4.000.000,00		4.000.000,00		4.000.000,00		6.000.000,00	
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	3.149.200,00	1	4.000.000,00	1	4.000.000,00	1	4.000.000,00	1	6.000.000,00	
2.09.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4.029.000,00		4.500.000,00		4.500.000,00		4.500.000,00		10.000.000,00	
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	4	4.029.000,00	4	4.500.000,00	4	4.500.000,00	4	4.500.000,00	4	10.000.000,00	
2.09.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah				0,00		1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00		3.000.000,00	
Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	0	13	0,00	13	1.500.000,00	13	1.500.000,00	13	1.500.000,00	13	3.000.000,00	
2.09.01.2.01.0010 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				723.000,00		723.000,00		723.000,00		723.000,00		723.000,00	

Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	0	1	723.000,00	1	723.000,00	1	723.000,00	1	723.000,00	1	723.000,00	
2.09.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.815.907.159,0 0		2.801.400.807,0 0		2.801.400.807,0 0		2.801.400.807,0 0		2.889.400.807,0 0	
Tersedianya dokumen Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang berkualitas	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	4	4	2.815.907.159,0 0	4	2.801.400.807,0 0	4	2.801.400.807,0 0	4	2.801.400.807,0 0	4	2.889.400.807,0 0	
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	30	30		30	30	30	30	30	30	30		
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	4	4		4	4	4	4	4	4	4		
2.09.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				2.717.639.659,0 0		2.709.400.807,0 0		2.709.400.807,0 0		2.709.400.807,0 0		2.709.400.807,0 0	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	30	30	2.717.639.659,0 0	30	2.709.400.807,0 0	30	2.709.400.807,0 0	30	2.709.400.807,0 0	30	2.709.400.807,0 0	
2.09.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				81.800.000,00		71.000.000,00		71.000.000,00		71.000.000,00		120.000.000,00	
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	4	4	81.800.000,00	4	71.000.000,00	4	71.000.000,00	4	71.000.000,00	4	120.000.000,00	
2.09.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				16.467.500,00		21.000.000,00		21.000.000,00		21.000.000,00		60.000.000,00	

Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	4	4	16.467.500,00	4	21.000.000,00	4	21.000.000,00	4	21.000.000,00	4	60.000.000,00	
2.09.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				5.424.000,00		5.800.000,00		5.800.000,00		5.800.000,00		8.000.000,00	
Tersedianya dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	4	4	5.424.000,00	4	5.800.000,00	4	5.800.000,00	4	5.800.000,00	4	8.000.000,00	
2.09.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				5.424.000,00		5.800.000,00		5.800.000,00		5.800.000,00		8.000.000,00	
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	4	4	5.424.000,00	4	5.800.000,00	4	5.800.000,00	4	5.800.000,00	4	8.000.000,00	
2.09.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				1.931.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		5.000.000,00	
Tersedianya dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	0	1	1.931.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	5.000.000,00	
2.09.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1.931.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		5.000.000,00	
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	0	1	1.931.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	5.000.000,00	
2.09.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				62.294.940,00		84.300.000,00		84.300.000,00		84.300.000,00		226.000.000,00	
Terwujudnya Pelayanan Administrasi umum Perangkat Daerah yang berkualitas	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	3	62.294.940,00	3	84.300.000,00	3	84.300.000,00	3	84.300.000,00	3	226.000.000,00	
	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	1	1		1		1		1		1		
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2	2		2		2		2		2		

	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	12	11		11		11		11		11		
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4	4		4		4		4		4		
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	6	6		6		6		6		6		
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	2	4		4		4		4		4		
2.09.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				1.557.600,00		1.800.000,00		1.800.000,00		1.800.000,00		6.000.000,00	
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	3	1.557.600,00	3	1.800.000,00	3	1.800.000,00	3	1.800.000,00	3	6.000.000,00	
2.09.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				1.585.600,00		1.700.000,00		1.700.000,00		1.700.000,00		5.000.000,00	
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	6	6	1.585.600,00	6	1.700.000,00	6	1.700.000,00	6	1.700.000,00	6	5.000.000,00	
2.09.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				1.079.800,00		1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00		5.000.000,00	
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	2	4	1.079.800,00	4	1.500.000,00	4	1.500.000,00	4	1.500.000,00	4	5.000.000,00	
2.09.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				5.020.440,00		8.000.000,00		8.000.000,00		8.000.000,00		15.000.000,00	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	12	11	5.020.440,00	11	8.000.000,00	11	8.000.000,00	11	8.000.000,00	11	15.000.000,00	
2.09.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				4.108.000,00		4.500.000,00		4.500.000,00		4.500.000,00		10.000.000,00	
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4	4	4.108.000,00	4	4.500.000,00	4	4.500.000,00	4	4.500.000,00	4	10.000.000,00	
2.09.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				1.166.000,00		1.800.000,00		1.800.000,00		1.800.000,00		5.000.000,00	

Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	1	1	1.166.000,00	1	1.800.000,00	1	1.800.000,00	1	1.800.000,00	1	5.000.000,00	
2.09.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				47.777.500,00		65.000.000,00		65.000.000,00		65.000.000,00		180.000.000,00	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2	2	47.777.500,00	2	65.000.000,00	2	65.000.000,00	2	65.000.000,00	2	180.000.000,00	
2.09.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				3.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		15.000.000,00	
Tersedianya dokumen Pelayanan Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat daerah yang berkualitas	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	3	4	3.000.000,00	4	50.000.000,00	4	50.000.000,00	4	50.000.000,00	4	15.000.000,00	
2.09.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				3.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		15.000.000,00	
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	3	4	3.000.000,00	4	50.000.000,00	4	50.000.000,00	4	50.000.000,00	4	15.000.000,00	
2.09.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				58.324.400,00		64.156.840,00		64.156.840,00		64.156.840,00		85.000.000,00	
Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	58.324.400,00	12	64.156.840,00	12	64.156.840,00	12	64.156.840,00	12	85.000.000,00	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12		
2.09.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				51.124.400,00		56.236.840,00		56.236.840,00		56.236.840,00		70.000.000,00	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	51.124.400,00	12	56.236.840,00	12	56.236.840,00	12	56.236.840,00	12	70.000.000,00	
2.09.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				7.200.000,00		7.920.000,00		7.920.000,00		7.920.000,00		15.000.000,00	

Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	7.200.000,00	12	7.920.000,00	12	7.920.000,00	12	7.920.000,00	12	15.000.000,00	
2.09.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				31.616.250,00		61.168.160,00		61.168.160,00		61.168.160,00		137.161.958,00	
Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	6	6	31.616.250,00	6	61.168.160,00	6	61.168.160,00	6	61.168.160,00	6	137.161.958,00	
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1		1		1		1		1		
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	21	21		21		21		21		21		
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	1	1		1		1		1		1		
2.09.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				14.426.250,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		60.000.000,00	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	21	21	14.426.250,00	21	35.000.000,00	21	35.000.000,00	21	35.000.000,00	21	60.000.000,00	
2.09.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				7.150.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		25.000.000,00	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	1	1	7.150.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	25.000.000,00	

2.09.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				5.040.000,00		6.000.000,00		6.000.000,00		6.000.000,00		15.000.000,00	
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	6	6	5.040.000,00	6	6.000.000,00	6	6.000.000,00	6	6.000.000,00	6	15.000.000,00	
2.09.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				5.000.000,00		10.168.160,00		10.168.160,00		10.168.160,00		37.161.958,00	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	5.000.000,00	1	10.168.160,00	1	10.168.160,00	1	10.168.160,00	1	37.161.958,00	
2.09.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN				0,00		138.500.000,00		138.500.000,00		138.500.000,00		532.000.000,00	
Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Nilai Tukar Petani (NTP) (Indeks)	151,89	154,39	0,00	155,64	138.500.000,00	156,89	138.500.000,00	158,14	138.500.000,00	159,39	532.000.000,00	2.09.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.02.2.01 - Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				0,00		138.500.000,00		138.500.000,00		138.500.000,00		532.000.000,00	
Tersedianya Infrastruktur dan pendukung kemandirian pangan	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia (Unit)	0	1	0,00	1	138.500.000,00	1	138.500.000,00	1	138.500.000,00	1	532.000.000,00	
2.09.02.2.01.0003 - Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya				0,00		138.500.000,00		138.500.000,00		138.500.000,00		532.000.000,00	
Tersedianya Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia (Unit)	0	1	0,00	1	138.500.000,00	1	138.500.000,00	1	138.500.000,00	1	532.000.000,00	
2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT				303.914.400,00		302.475.000,00		302.475.000,00		302.475.000,00		1.785.000.000,00	
Meningkatnya Diversifikasi & Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase Ketersediaan Energi (%)	100	100	303.914.400,00	100	302.475.000,00	100	302.475.000,00	100	302.475.000,00	100	1.785.000.000,00	2.09.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS KETAHANAN PANGAN
	Persentase Konsumsi Energi (%)	100	100		100		100		100		100		

2.09.03.2.01 - Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan				141.703.600,00		110.200.000,00		110.200.000,00		110.200.000,00		395.000.000,00	
Terlaksananya Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah Kabupaten/Kota dalam rangka stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya (Laporan)	1	1	141.703.600,00	1	110.200.000,00	1	110.200.000,00	1	110.200.000,00	1	395.000.000,00	
	Data Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1		1		1		1		1		
	Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota (laporan)	1	1		1		1		1		1		
	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM) (Dokumen)	1	1		1		1		1		1		
2.09.03.2.01.0003 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya				15.510.400,00		20.200.000,00		20.200.000,00		20.200.000,00		35.000.000,00	
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya (Laporan)	1	1	15.510.400,00	1	20.200.000,00	1	20.200.000,00	1	20.200.000,00	1	35.000.000,00	
2.09.03.2.01.0008 - Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota				96.433.600,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		280.000.000,00	
Terlaksananya Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota (laporan)	1	1	96.433.600,00	1	40.000.000,00	1	40.000.000,00	1	40.000.000,00	1	280.000.000,00	
2.09.03.2.01.0016 - Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)				14.999.800,00		22.500.000,00		22.500.000,00		22.500.000,00		40.000.000,00	
Tersedianya Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM) (Dokumen)	1	1	14.999.800,00	1	22.500.000,00	1	22.500.000,00	1	22.500.000,00	1	40.000.000,00	

2.09.03.2.01.0020 - Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota				14.759.800,00		27.500.000,00		27.500.000,00		27.500.000,00		40.000.000,00	
Tersedianya data proyeksi neraca pangan Wilayah Kabupaten/Kota	Data Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1	14.759.800,00	1	27.500.000,00	1	27.500.000,00	1	27.500.000,00	1	40.000.000,00	
2.09.03.2.02 - Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota				121.311.300,00		133.275.000,00		133.275.000,00		133.275.000,00		1.040.000.000,00	
Terkelolanya Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah LPM yang terfasilitasi (kelompok)	0	0	121.311.300,00	3	133.275.000,00	3	133.275.000,00	3	133.275.000,00	3	1.040.000.000,00	
	Rencana Kebutuhan Pangan Lokal (Dokumen)	1	1		1		1		1		1		
	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Ton)	7	20		30		40		50		60		
2.09.03.2.02.0002 - Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal				17.310.800,00		20.500.000,00		20.500.000,00		20.500.000,00		40.000.000,00	
Tersusunnya Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Rencana Kebutuhan Pangan Lokal (Dokumen)	1	1	17.310.800,00	1	20.500.000,00	1	20.500.000,00	1	20.500.000,00	1	40.000.000,00	
2.09.03.2.02.0003 - Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota				104.000.500,00		100.775.000,00		100.775.000,00		100.775.000,00		800.000.000,00	
Tersedianya Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Ton)	7	20	104.000.500,00	30	100.775.000,00	40	100.775.000,00	50	100.775.000,00	60	800.000.000,00	
2.09.03.2.02.0008 - Penguatan Lumbung Pangan Masyarakat (LPM)				0,00		12.000.000,00		12.000.000,00		12.000.000,00		200.000.000,00	
Terlaksananya kegiatan penguatan Lumbung Pangan Masyarakat (LPM)	Jumlah LPM yang terfasilitasi (kelompok)	0	0	0,00	3	12.000.000,00	3	12.000.000,00	3	12.000.000,00	3	200.000.000,00	
2.09.03.2.04 - Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi				40.899.500,00		59.000.000,00		59.000.000,00		59.000.000,00		350.000.000,00	
Tercapainya Konsumsi Energi Perkapita / Tahun Sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (Laporan)	1	1	40.899.500,00	1	59.000.000,00	1	59.000.000,00	1	59.000.000,00	1	350.000.000,00	
	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun (Dokumen)	1	1		1		1		1		1		

2.09.03.2.04.0001 - Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun				19.899.500,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		50.000.000,00	
Terlaksananya Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun (Dokumen)	1	1	19.899.500,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	50.000.000,00	
2.09.03.2.04.0002 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				21.000.000,00		34.000.000,00		34.000.000,00		34.000.000,00		300.000.000,00	
Terlaksananya Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (Laporan)	1	1	21.000.000,00	1	34.000.000,00	1	34.000.000,00	1	34.000.000,00	1	300.000.000,00	
2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN				43.000.700,00		46.700.000,00		46.700.000,00		46.700.000,00		90.000.000,00	
Meningkatnya Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Capaian Analisis Rentan dan Rawan Pangan (%)	90	95	43.000.700,00	100	46.700.000,00	100	46.700.000,00	100	46.700.000,00	100	90.000.000,00	2.09.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.04.2.01 - Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan				20.000.700,00		24.100.000,00		24.100.000,00		24.100.000,00		50.000.000,00	
Tersedianya Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan (Dokumen)	1	1	20.000.700,00	1	24.100.000,00	1	24.100.000,00	1	24.100.000,00	1	50.000.000,00	
2.09.04.2.01.0001 - Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan				20.000.700,00		24.100.000,00		24.100.000,00		24.100.000,00		50.000.000,00	
Tersusunnya Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan (Dokumen)	1	1	20.000.700,00	1	24.100.000,00	1	24.100.000,00	1	24.100.000,00	1	50.000.000,00	
2.09.04.2.02 - Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota				23.000.000,00		22.600.000,00		22.600.000,00		22.600.000,00		40.000.000,00	
Terlaksananya Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota (Laporan)	12	12	23.000.000,00	12	22.600.000,00	12	22.600.000,00	12	22.600.000,00	12	40.000.000,00	

2.09.04.2.02.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota				23.000.000,00		22.600.000,00		22.600.000,00		22.600.000,00		40.000.000,00	
Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota (Laporan)	12	12	23.000.000,00	12	22.600.000,00	12	22.600.000,00	12	22.600.000,00	12	40.000.000,00	
2.09.05 - PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN				19.428.700,00		25.300.000,00		25.300.000,00		25.300.000,00		80.000.000,00	
Meningkatnya Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan	Persentase PSAT yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan (%)	55	62	19.428.700,00	64	25.300.000,00	66	25.300.000,00	68	25.300.000,00	70	80.000.000,00	2.09.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.05.2.01 - Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota				19.428.700,00		25.300.000,00		25.300.000,00		25.300.000,00		80.000.000,00	
Terlaksananya Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah pelaksanaan koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan (Laporan)	1	1	19.428.700,00	1	25.300.000,00	1	25.300.000,00	1	25.300.000,00	1	80.000.000,00	
2.09.05.2.01.0008 - Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan				19.428.700,00		25.300.000,00		25.300.000,00		25.300.000,00		80.000.000,00	
Terlaksananya koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah pelaksanaan koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan (Laporan)	1	1	19.428.700,00	1	25.300.000,00	1	25.300.000,00	1	25.300.000,00	1	80.000.000,00	

Daftar sub kegiatan prioritas dalam mendukung program prioritas Pembangunan daerah pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mamuju untuk periode lima tahun dapat dilihat pada table 4.3 berikut :

Tabel 4.3  
Daftar Sub Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Subkegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Program Peningkatan Diversifikasi & Ketahanan Pangan Masyarakat	Meningkatnya Diversifikasi & Ketahanan Pangan Masyarakat	<b>Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah Kabupaten/Kota dalam rangka stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan</b>	
			Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	Gerakan Pangan Murah (GPM) dalam pengendalian Inflasi (PSN / Astacita 2)
			<b>Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota</b>	
			Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Cadangan beras mendukung Program Strategis Nasional (PSN / Astacita 2)
			Penguatan Lumbung Pangan Masyarakat (LPM)	Cadangan Pangan Masyarakat pengendalian kemiskinan (PSN / Astacita 2)
			<b>Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita / Tahun Sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi</b>	
			Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Mendukung stunting dan kemiskinan (PSN / Astacita 2)

2	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Meningkatnya Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan	<b><i>Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten / Kota</i></b>	
			Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Mendukung kegiatan MBG (PSN / Astacita 2)

#### **4.2. Kinerja Penyelenggaraan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mamuju**

Indikator kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mamuju berlandaskan kepada tujuan dan sasaran yang tercantum di dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah, baik Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menilai pencapaian hasil akhir dari suatu organisasi atau unit kerja dalam mencapai tujuan strategisnya maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang digunakan untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan proses atau kegiatan operasional yang mendukung pencapaian IKU. Ukuran Indikator kinerja yang tercantum di dalam Rencana Pembangunan Daerah telah memperjelas kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mamuju untuk lima tahun ke depan. Penetapan indikator kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mamuju telah dilakukan identifikasi sesuai dengan lingkup bidang pelayanan terkait dengan memperhatikan tugas dan fungsi yang mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Mamuju 2025-2029. Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Ketahanan Pangan dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 4.4  
Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten  
Kabupaten Mamuju

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
	2.09.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN									
1	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	Indeks	81,47	82,97	84,47	85,97	87,47	88,97	90,47	
2	Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi	Nilai	86	87	88	88,50	89	89,50	89,55	
3	Skor Pola Pangan Harapan Ketersediaan	Nilai	95,28	95,30	95,35	95,40	95,45	95,50	95,55	
4	Persentase Stabilitas Harga Pangan Pokok Strategis	%	100	100	100	100	100	100	100	

Tabel 4.5  
Indikator Kinerja Daerah (IKD) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten  
Mamuju

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
<b>2.09.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN</b>										
I	<b>ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI</b>									
1	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	Indeks	81,47	82,97	84,47	85,97	87,47	88,97	90,47	
II	<b>INDIKATOR KINERJA KUNCI</b>									
1	Persentase Ketersediaan Energi	%	100	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase Capaian Analisis Rentan dan Rawan Pangan	%	90	90	95	100	100	100	100	
3	Persentase PSAT yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan	%	55	60	62	64	66	68	70	
4	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	%	60	60	62	64	66	68	70	
5	Persentase Desa Rentan Rawan Pangan	%	5,60	5,68	4,54	3,40	2,27	1,13	0	
6	Persentase Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	%	100	100	100	100	100	100	100	

Tabel 4.6  
Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten  
Kabupaten Mamuju

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.	2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN										
2.	Nilai SAKIP OPD	positif	Nilai	68,95	69	69,3	69,6	69,9	70,5	71	
3.	Persentase Ketersediaan Energi	komulatif	%	100	100	100	100	100	100	100	
4.	Persentase PSAT yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan	positif	%	55	60	62	64	66	68	70	
5.	Persentase Capaian Analisis Rentan dan Rawan Pangan	positif	%	90	90	95	100	100	100	100	
6.	Persentase Desa Rentan Rawan Pangan	negatif	%	5,60	5,68	4,54	3,40	2,27	1,13	0	
7.	Persentase Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
8.	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	positif	%	60	60	62	64	66	68	70	

## **BAB V PENUTUP**

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mamuju berlaku selama lima tahun kedepan dari tahun 2025 hingga 2029. Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mamuju merupakan rumusan dokumen perencanaan yang memaparkan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran.

Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan ini diharapkan bermanfaat dalam menguatkan peran berbagai pemangku kepentingan dalam pelaksanaan rencana kinerja, serta sebagai tolok ukur keberhasilan dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Perangkat Daerah. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mamuju Tahun 2025-2029 tidak terlepas dari adanya dukungan dan komitmen pimpinan dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi serta wewenang yang menjadi tanggung jawabnya.

Dengan dirumuskannya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mamuju Tahun 2025-2029 diharapkan menjadi salah satu pedoman dan acuan yang dapat memfasilitasi dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan strategis di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mamuju sehingga mampu mengakomodir kepentingan dan pelayanan terhadap masyarakat, Perangkat Daerah yang lain dan juga memberikan kontribusi optimal bagi pencapaian Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Mamuju.

Mamuju,      Desember 2025  
Plt. Kepala Dinas



**MUHAMMAD JUFRI BADAU, SKM, M. Kes**  
Pangkat : Pembina Utama Muda  
NIP. 19760123 200501 1 008